J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.5, No.1, Desember 2025

Pengaruh Ketidaksetaraan Gender Terhadap Sektor Bisnis dan Kesehatan pada Pertumbuhan Ekonomi di Negara Asia Berkembang

Hendika Dwinanda Wicaksana[1], Gema Pertiwi[2], Winda Eka Pahla Ayuningtyas[3], Fitria Hani Aprina[4], Deanda Dewindaru[5]
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia
E-mail: hendikawicaksana@upnvj.ac.id[1], gemapertiwi@upnvj.ac.id[2], windaekapahlaa@upnvj.ac.id[3], fitriahaniaprina@upnvj.ac.id[4], deandad@upnvj.ac.id[5]

Article History:
Received: 26 September 2025
Revised: 28 Oktober 2025
Accepted:25 November 2025

Keywords: *Ketidaksetaraan Gender, Sektor Bisnis dan Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi, Negara Asia Berkembang*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh ketidaksetaraan gender terhadap kontribusi sektor bisnis dan kesehatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang Asia. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi litetarur, studi ini menganalisis bagaimana ketidaksetaraan gender membatasi partisipasi dan akses perempuan dalam sektor bisnis serta layanan kesehatan, yang berdampak pada efektivitas kedua sektor tersebut dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi. Studi dilakukan pada beberapa negara berkembang Asia dengan variasi tingkat ketidaksetaraan gender dan kondisi ekonomi. Temuan menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender secara signifikan menghambat sinergi antara sektor bisnis dan kesehatan dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggaris bawahi pentingnya intervensi kebijakan yang menargetkan pengurangan ketidaksetaraan gender sebagai upaya strategis untuk mengoptimalkan kontribusi sektor bisnis dan kesehatan dalam pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang Asia sangat bergantung pada kontribusi sektor bisnis dan kesehatan. Sektor bisnis berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi, sementara sektor kesehatan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang menjadi faktor utama produktivitas ekonomi. Namun, ketidaksetaraan gender masih menjadi tantangan signifikan yang membatasi akses dan partisipasi perempuan dalam kedua sektor tersebut (Alfiyahnur & Juliannisa, 2023).

Berbagai studi telah menegaskan bahwa pengurangan ketidaksetaraan gender dapat meningkatkan partisipasi tenaga kerja perempuan dan memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat, yang secara langsung mendukung pembangunan ekonomi. Namun, penelitian yang

secara khusus mengeksplorasi dampak ketidaksetaraan gender sebagai variabel yang memoderasi hubungan antara sektor bisnis, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang Asia masih terbatas. Pemahaman yang mendalam mengenai peran ketidaksetaraan gender dalam konteks ini sangat penting untuk merancang kebijakan yang efektif dan tepat sasaran (Ravika et al., 2024).

		Subindexes			
	Global Gender Gap Index	Economic Participation and Opportunity	Educational Attainment	Health and Survival	Political Empowerment
Central Asia	69.1%	66.8%	98.7%	96.4%	14.6%
Eastern Asia and the Pacific	69.2%	71.8%	95.3%	95.0%	14.6%
Europe	75.0%	68.0%	99.5%	97.0%	35.7%
Latin America and the Caribbean	74.2%	65.7%	99.5%	97.6%	34.0%
Middle East and Northern Africa	61.7%	42.7%	96.8%	96.4%	10.8%
Northern America	74.8%	76.3%	100.0%	96.9%	26.0%
Southern Asia	63.7%	38.8%	94.5%	95.4%	26.0%
Sub-Saharan Africa	68.4%	67.4%	86.7%	97.2%	22.4%
Global average	68.5%	60.5%	94.9%	96.0%	22.5%

Gambar 1. Regional Perfomance, 2024

Pada tahun 2024, laporan *Global Gender Gap Report* menunjukkan bahwa kesenjangan gender paling kecil terdapat pada subindeks Kesehatan dan Kelangsungan Hidup (96%) dan Pencapaian Pendidikan (94,9%). Namun, kesenjangan masih besar pada Partisipasi Ekonomi (60,5%) dan terutama pada Pemberdayaan Politik (22,5%).

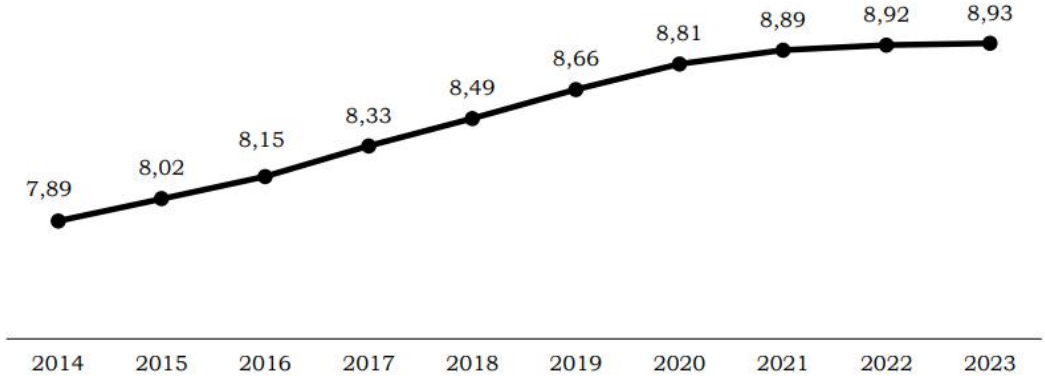
Sementara itu, menurut *Travel & Tourism Development Index (TTDI) 2024*, Eropa mencatat kinerja terbaik secara regional, unggul dalam infrastruktur dan kesiapan teknologi. Asia-Pasifik berada di peringkat kedua namun mengalami penurunan pada beberapa pilar. Afrika Sub-Sahara menunjukkan peningkatan paling signifikan sejak 2019. Di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi mengalami pertumbuhan positif dalam aspek sosial ekonomi pariwisata.

Kondisi perekonomian Asia telah mendorong perubahan paradigma dalam teori pembangunan ekonomi. Seiring dengan peningkatan pendapatan, modal manusia berperan menggantikan modal fisik sebagai faktor dominan yang mendorong pertumbuhan ekonomi (Rani, 2020). Menurut (Sredojević et al., 2016) model pertumbuhan neoklasik awal terbukti kurang memadai dalam menjelaskan disparitas pertumbuhan ekonomi jangka panjang, sehingga menstimulus munculnya teori pertumbuhan endogen yang menegaskan bahwa sumber pertumbuhan berasal dari mekanisme internal dalam sistem ekonomi.

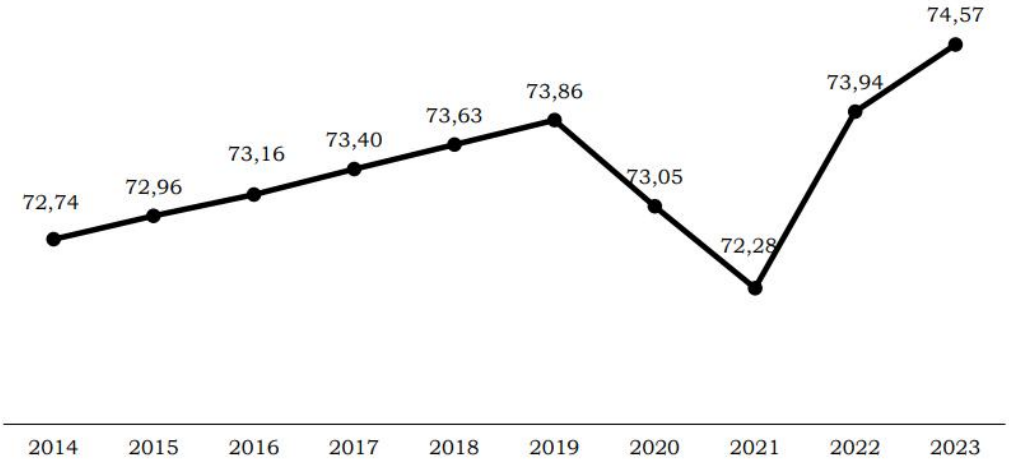
Secara konseptual, modal manusia merujuk pada akumulasi pengetahuan, keterampilan, serta atribut kesehatan yang melekat pada individu. Pembentukan modal manusia ini didukung oleh investasi baik dari sektor publik maupun swasta yang bersifat signifikan (Baron & Armstrong, 2007), karena manfaatnya tidak hanya dirasakan secara individual tetapi juga menghasilkan eksternalitas positif bagi masyarakat secara luas.

Dalam kajian ekonomi pembangunan, pendidikan dan kesehatan dianggap sebagai dua pilar utama modal manusia, dengan peran perempuan diidentifikasi sebagai faktor penting yang dapat mempercepat proses pembangunan (Kaloko et al., 2025). Kedua pilar tersebut memiliki hubungan timbal balik yang erat, di mana pendidikan memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan.Pendidikan sebagai pilar utama memiliki keterkaitan yang mapan dengan aspek ekonomi, sebagaimana tercermin dalam model fungsi pendapatan Mincer yang mengaitkan durasi

pendidikan formal dengan tingkat upah individu (Mincer, 1994). Selain kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan, pendidikan berperan signifikan dalam pengembangan keterampilan kognitif dan nonkognitif yang esensial bagi kemajuan dan stabilitas perekonomian makro.



Gambar 2. Rata-rata Lama Sekolah di Negara Berkembang Asia Tahun 2014-2023 (Budiman & Lubis, 2025)



Gambar 3. Angka Harapan Hidup (AHH) di Negara Berkembang Asia (Budiman & Lubis, 2025)

Pilar kedua yakni kesehatan, didefinisikan sebagai aset krusial bagi kegiatan ekonomi produktif Kesehatan dan pendidikan dapat dipandang sebagai komponen integral dari modal manusia . Sinergi antara keduanya tercermin secara konsisten dalam literatur sebelumnya, yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi berkontribusi pada peningkatan perilaku dan kualitas kesehatan, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Kaloko et al., 2025).

Landasan Teori

Konsep *Human Capital*

Dalam kajian manajemen dan ekonomi, *human capital* sering dipahami sebagai tenaga kerja yang memiliki keterampilan untuk mendukung tujuan organisasi (Wibowo & Utomo, 2023). Namun (Yuniarsih et al., 2022) memperluas definisi ini dengan memasukkan karakter, sikap, kesehatan, dan motivasi individu sebagai bagian penting dari *human capital*. Selain itu, pengetahuan sebagai aset tak berwujud juga berperan signifikan dalam meningkatkan kinerja. Meskipun sering disamakan dengan sumber daya manusia, *human capital* lebih menekankan

pada kualitas dan nilai produktif individu.

Menurut (Arifin, 2023) membedakan secara tegas antara konsep *human capital* (modal manusia) dan sumber daya manusia. *Human capital* mencakup keterampilan, kemampuan, aspirasi, kesehatan, dan elemen lainnya yang merupakan hasil investasi dalam bidang pendidikan, pelatihan kerja, serta program pemeliharaan kesehatan. Sebaliknya, sumber daya manusia merujuk pada kuantitas dan kualitas tenaga kerja dalam suatu negara. Modal manusia sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan kesehatan, yang keduanya berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja.

Sejalan dengan pandangan Arifin, (Adriani, 2019) menyatakan bahwa *human capital* berkaitan erat dengan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki individu, yang diperoleh melalui proses pendidikan, pelatihan, dan pengalaman, serta berperan penting dalam produksi barang, jasa, dan pengembangan pengetahuan lebih lanjut. Oleh karena itu, pendidikan dianggap sebagai elemen utama dalam pembentukan modal manusia, yang didukung oleh faktor-faktor pendukung lainnya seperti kesehatan, lingkungan kerja, dan aspek terkait lainnya.

Ketidaksetaraan Gender

Sejalan dengan pandangan Arifin, (Adriani, 2019) menyatakan bahwa *human capital* berkaitan erat dengan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki individu, yang diperoleh melalui proses pendidikan, pelatihan, dan pengalaman, serta berperan penting dalam produksi barang, jasa, dan pengembangan pengetahuan lebih lanjut. Oleh karena itu, pendidikan dianggap sebagai elemen utama dalam pembentukan modal manusia, yang didukung oleh faktor-faktor pendukung lainnya seperti kesehatan, lingkungan kerja, dan aspek terkait lainnya.

Hal ini juga didukung oleh pernyataan (Halizah & Faralita, 2023) kesetaraan gender memiliki peran strategis dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Pertama, kesetaraan gender berfungsi sebagai prinsip fundamental dalam mencapai keadilan sosial dengan memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang setara di berbagai bidang kehidupan. Kedua, kesetaraan gender menjadi instrumen pemberdayaan perempuan, yang memungkinkan mereka mengakses pendidikan, pekerjaan, serta posisi pengambilan keputusan secara setara, sehingga potensi individu dapat dimaksimalkan.

Teori Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Theory)

Konsep pemberdayaan gender merujuk pada sejauh mana perempuan memiliki peran aktif dan substantif dalam berbagai sektor kehidupan, khususnya dalam ranah ekonomi dan politik. Hal ini mencakup partisipasi perempuan dalam proses politik, keterlibatan dalam aktivitas ekonomi, peran serta dalam pengambilan keputusan strategis, serta kemampuan untuk mengakses dan menguasai sumber daya ekonomi secara mandiri. Dimensi-dimensi tersebut menjadi indikator utama dalam pengukuran Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Measure/GEM), yang digunakan untuk menilai tingkat kesetaraan dan kapasitas perempuan dalam mempengaruhi arah pembangunan sosial dan ekonomi. (Kertati, 2021).

Pemberdayaan gender berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena memungkinkan perempuan untuk berperan secara optimal dalam bidang politik, khususnya dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan perempuan. Perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi, melalui pendapatan yang diperoleh, cenderung mampu meningkatkan akses terhadap pendidikan bagi dirinya sendiri maupun keluarganya, mengingat kesejahteraan sering kali berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan. Selain itu, perempuan yang berpenghasilan juga memiliki kapasitas lebih besar untuk memenuhi kebutuhan layanan

kesehatan dan memperhatikan kualitas gizi keluarga, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan (Sari et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai fenomena yang berkaitan dengan subjek penelitian, dengan fokus pada berbagai aspek seperti perilaku, persepsi, motivasi, serta tindakan yang muncul dalam konteks tertentu (Moleong, 2018). Hal yang sama diungkpakan oleh (Creswell & Creswell, 2017) bahwa penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi permasalahan dan pengembangan pemahaman terperinci mengenai fenomena sentral. Penelitian ini menggunakan model kualitatif dengan pendekatan studi literatur.

Menurut (Irfan & Anirwan, 2023) studi literatur merupakan proses menelaah data yang bersumber dari berbagai referensi seperti buku dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memperoleh dasar teori yang mendukung permasalahan yang akan diteliti. Studi literatur juga dikenal sebagai penelitian pustaka atau penelitian kepustakaan. Fenomena yang sedang di teliti mengenai pengaruh ketidaksetaraan gender terhadap sektor bisnis dan kesehatan pada pertumbuhan ekonomi di negara asia berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidaksetaraan Gender di Negara Asia Berkembang

Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan World Economic Forum (WEF) dan United Nations Development Programme (UNDP) tahun 2024, ketimpangan gender di negara-negara berkembang di Asia, seperti India, Bangladesh, Pakistan, dan Indonesia, masih menunjukkan tingkat yang mengkhawatirkan. Indeks Ketimpangan Gender (Gender Inequality Index/GII) yang diterbitkan oleh UNDP menempatkan negara-negara tersebut pada peringkat yang relatif rendah dalam hal kesetaraan gender, yang mencerminkan masih terbatasnya akses perempuan terhadap pendidikan, partisipasi dalam pasar tenaga kerja, serta layanan kesehatan yang memadai.

Data dari International Labour Organization (ILO) tahun 2024 menunjukkan bahwa di Bangladesh, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan hanya mencapai sekitar 36%, jauh tertinggal dibandingkan dengan tingkat partisipasi laki-laki yang melebihi 80%. Di Pakistan, ketimpangan ini bahkan lebih mencolok, dengan tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan yang berada di bawah 25%. Selain itu, perempuan di kedua negara tersebut masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi struktural dan sosial di tempat kerja, termasuk kesenjangan upah, akses terbatas terhadap posisi manajerial, serta norma budaya yang membatasi peran perempuan di ranah publik dan ekonomi. Ketidaksetaraan gender di negara-negara Asia berkembang tercermin dari rendahnya partisipasi ekonomi perempuan, kesenjangan upah, kurangnya keterwakilan politik, serta hambatan budaya dan struktural, yang berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pembangunan berkelanjutan.

Tabel 1 Ketidaksetaraan Gender di Negara Asia Berkembang

Karakteristik	Pemahaman/Pengertian
Partisipasi Ekonomi	Di Asia Timur & Pasifik, ada beberapa negara yang memiliki partisipasi perempuan kerja formal > 40%, tapi tetap ada gap signifikan dalam posisi senior, manajerial dan gaji yang diperoleh.

Pendidikan dan Kesehatan	Banyak negara telah menutup gap dalam *Educational Attainment* dan *Health & Survival* relatif baik; skor untuk pendidikan dan kesehatan sering di atas 90% untuk kesetaraan gender menurut laporan WEF.
Keterwakilan Politik & Kekuasaan	Political Empowerment adalah area dengan perbaikan paling lambat. Banyak negara di Asia Timur & Pasifik memiliki skor di bawah 10% pada sub-indeks ini. Contohnya, di Indonesia, skor *Political Empowerment* rendah, dan representasi wanita di jabatan menteri dan legislatif masih jauh dari keseimbangan
Biaya Peluang dan Tenaga Kerja	Ketidaksetaraan gender seringkali berarti potensi bakat perempuan tidak digunakan sepenuhnya: perempuan mungkin kurang diberi kesempatan naik jabatan, atau mereka keluar dari karier karena tanggung jawab domestik/care-work. Hal ini menyebabkan rotasi tenaga kerja lebih tinggi, kehilangan pengalaman, dan biaya pelatihan/ganti pekerja yang lebih besar

Ketidaksetaraan gender di negara-negara Asia berkembang menunjukkan karakteristik yang kompleks dan multidimensional, mencakup sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, serta aspek sosial dan budaya. Meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam indikator pendidikan dan kesehatan, seperti peningkatan tingkat melek huruf dan akses layanan kesehatan dasar, ketimpangan tetap terlihat nyata dalam partisipasi ekonomi perempuan, keterwakilan politik, serta perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender (Lim & Silalahi, 2024).

Partisipasi kerja perempuan yang masih rendah, ketimpangan upah, serta dominasi laki-laki dalam posisi kepemimpinan ekonomi dan politik mengindikasikan adanya hambatan struktural dan norma patriarkal yang mengakar kuat. Selain itu, kerentanan sosial perempuan—terutama dalam konteks kemiskinan dan dampak perubahan iklim—menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya inklusif gender. Oleh karena itu, pencapaian kesetaraan gender di Asia tidak hanya memerlukan perbaikan pada level indikator kuantitatif, tetapi juga transformasi institusional, reformasi kebijakan, serta perubahan sosial-budaya yang lebih mendasar dan berkelanjutan (Shintiya et al., 2025).

Dampak Ketidaksetaraan Gender Terhadap Sektor Bisnis.

Ketidaksetaraan gender di sektor bisnis negara-negara Asia berkembang berdampak signifikan terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Asia Selatan hanya sekitar 25,6%, jauh lebih rendah dibanding laki-laki yang mencapai 74,7%. Selain itu, perempuan menghadapi keterbatasan akses pendidikan, pelatihan, modal, dan jaringan bisnis, yang membatasi kontribusi mereka dalam ekonomi. Contohnya, 90% UMKM milik perempuan di India bergantung pada sumber pembiayaan informal. Stereotip gender juga membatasi perempuan menduduki posisi strategis dalam bisnis, seperti terlihat di Korea Selatan, di mana perempuan mendapat skor rendah dalam kategori upah (Napitupulu & Ekawaty, 2022).

Penelitian (Kennedy et al., 2020) menunjukkan bahwa peningkatan kesetaraan gender di Asia Pasifik dapat menambah $4,5 triliun ke PDB tahunan pada 2025. Dengan demikian, mengatasi ketidaksetaraan gender sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

inklusif dan berkelanjutan di kawasan ini. Ketidaksetaraan gender pada sektor bisnis di negara Asia berkembang tercermin dari keterbatasan akses informasi dan teknologi digital, kesenjangan representasi dalam kepemimpinan, keterbatasan akses sumberdaya serta hambatan dalam komunikasi bisnis digital.

Tabel 2 Ketidaksetaraan Gender Terhadap Sektor Bisnis di Negara Asia Berkembang

Karakteristik	Pemahaman/Pengertian
Keterbatasan Akses Informasi Digital	Di banyak negara Asia berkembang, perempuan menghadapi hambatan dalam akses teknologi dan informasi. Meskipun 92% perempuan memiliki ponsel pintar, 45% dari mereka tidak memiliki akses internet reguler karena biaya dan masalah konektivitas. Selain itu, 57% mengalami pelecehan online, yang menghambat partisipasi mereka dalam komunikasi bisnis digital.
Kesenjangan dalam Pengambilan Keputusan	Di Malaysia, meskipun 41% perusahaan teknologi dimiliki oleh perempuan, hanya 22% perempuan yang mencapai posisi manajerial menengah, sering kali karena diskriminasi gender dalam promosi dan struktur kepemimpinan yang didominasi laki-laki. Kurangnya representasi perempuan dalam posisi strategis menghambat aliran komunikasi yang inklusif dan pengambilan keputusan yang beragam perspektif.
Keterbatasan Akses Sumber Daya	Di Asia Selatan, lebih dari 90% dari 15 juta UKM yang dimiliki perempuan di India mengandalkan sumber pembiayaan informal, seperti tabungan pribadi atau pinjaman keluarga, karena kurangnya akses ke kredit formal. Keterbatasan ini membatasi kemampuan perempuan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dalam ekspansi bisnis dan inovasi.
Biaya Peluang dan Tenaga Kerja	Partisipasi perempuan dalam tenaga kerja di Asia Selatan bisa ditingkatkan mendekati tingkat partisipasi laki- laki, potensi peningkatan PDB regional bisa sampai 51%. Ini menggambarkan biaya peluang besar dari tidak mengikutsertakan perempuan secara penuh dalam ekonomi

Dampak ketidaksetaraan Gender terhadap sektor Kesehatan

Ketidaksetaraan gender merupakan salah satu determinan sosial kesehatan yang secara signifikan memengaruhi akses, kualitas, dan hasil layanan kesehatan, terutama di negara-negara Asia berkembang. Dalam konteks ini, perempuan sering menghadapi hambatan struktural dan sosial dalam mengakses layanan kesehatan dasar, termasuk layanan kesehatan reproduksi, prenatal, dan postnatal. Data menunjukkan bahwa tingginya tingkat ketimpangan gender, yang tercermin dalam rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya otonomi dalam pengambilan keputusan rumah tangga, serta ketergantungan ekonomi terhadap laki-laki, berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu dan anak (Kalindi et al., 2023).

Studi lintas negara oleh (van Daalen et al., 2024) mengungkapkan bahwa peningkatan indeks ketidaksetaraan gender berkorelasi positif dengan meningkatnya angka kematian bayi dan balita, khususnya di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Selain itu, norma sosial patriarkal seringkali membatasi mobilitas perempuan dan memperburuk diskriminasi dalam pemberian perawatan medis, terutama di daerah pedesaan. Ketidakmerataan distribusi fasilitas kesehatan antara wilayah urban dan rural turut memperparah disparitas ini, di mana perempuan di daerah terpencil memiliki risiko lebih tinggi untuk tidak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.

Tabel 3 Ketidaksetaraan Gender Terhadap Sektor Kesehatan di Negara Asia Berkembang

Karakteristik	Pemahaman/Pengertian
Keterbatasan Akses Informasi Kesehatan	Dalam studi "The Digital Divide and Seeking Health Information on Smartphones in Asia" ditemukan bahwa faktor demografis seperti jenis kelamin, status sosial ekonomi, tingkat pendidikan, dan penggunaan teknologi (smartphone / frekuensi pemakaian) sangat berpengaruh terhadap kemungkinan seseorang mencari informasi kesehatan lewat ponsel pintar. Perempuan, orang tua, dan mereka dengan tingkat sosial ekonomi lebih tinggi lebih mungkin menggunakan smartphone untuk mencari info kesehatan.
Akses Asuransi Kesehatan	Studi di enam negara Asia Tenggara menunjukkan bahwa cakupan asuransi kesehatan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Contohnya: di Indonesia, persentase perempuan berusia 15-49 tahun yang memiliki asuransi kesehatan mencapai ~58,2%, sedikit lebih tinggi dari laki-laki (~56,6%), tetapi di Bangladesh sangat rendah (sekitar 0,3% perempuan)..
Keterbatasan Komunikasi Sensitif Gender	Beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun perempuan di negara-negara Asia berkembang cenderung mengakses dan membaca materi terkait kesehatan, mereka kerap tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai prosedur medis, pemeriksaan prenatal, skrining kanker seperti kanker serviks, maupun informasi mengenai layanan kesehatan reproduksi. Kesenjangan ini umumnya disebabkan oleh hambatan bahasa, rendahnya tingkat literasi kesehatan, serta norma budaya yang membatasi keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan pribadi.

Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Ketidaksetaraan gender di sektor bisnis negara-negara Asia berkembang berdampak signifikan terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Asia Selatan hanya sekitar 25,6%, jauh lebih rendah dibanding laki-laki yang mencapai 74,7%. Ketimpangan gender masih menjadi masalah signifikan di banyak negara Asia berkembang, seperti India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, dan Filipina. Ketimpangan ini mencakup perbedaan akses pendidikan, kesempatan kerja, upah, serta akses terhadap layanan

kesehatan dan perlindungan sosial. Berdasarkan *Global Gender Gap Report 2023* oleh World Economic Forum, Asia Selatan menempati posisi dengan ketimpangan gender tertinggi di dunia, dengan skor kesetaraan gender rata-rata sekitar 62.4% (artinya masih ada gap 37.6%). Ketimpangan ini membatasi partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan mengurangi potensi produktivitas nasional (Ravika et al., 2024).

Negara dengan ketimpangan gender yang tinggi memiliki partisipasi tenaga kerja perempuan yang rendah. Misalnya, di India, partisipasi tenaga kerja perempuan hanya sekitar 20-25%, jauh di bawah laki-laki. Rendahnya partisipasi ini mengurangi potensi output nasional. Perempuan seringkali dibayar lebih rendah dan kurang mendapatkan promosi, yang menyebabkan pemborosan sumber daya manusia dan menurunkan motivasi kerja. Ketimpangan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan menyebabkan perempuan kurang produktif dan berkontribusi kurang optimal terhadap ekonomi (Costagliola, 2021).



Gambar 4. Tingkat Kesenjangan Gender di Negara Berkembang Tahun 2023

Kesenjangan gender merupakan isu krusial yang terus menjadi tantangan utama dalam upaya pembangunan sosial dan ekonomi di negara-negara Asia berkembang. Ketimpangan ini tidak hanya mencakup perbedaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja, tetapi juga meluas ke aspek sosial, politik, dan budaya yang menghambat perempuan untuk berkontribusi secara optimal dalam berbagai sektor kehidupan. Meskipun telah terjadi kemajuan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan struktural dan sistemik yang membatasi peran serta mereka dalam pembangunan nasional (Kedhaton & Adzmy, 2024).

Data pada tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan gender secara umum di negara-negara Asia berkembang berada pada angka 69,2%. Angka ini mengindikasikan bahwa hampir 31% kesempatan dan sumber daya yang seharusnya dapat diakses secara setara antara laki-laki dan perempuan masih belum tercapai.Ketimpangan ini terlihat jelas pada berbagai indikator sosial-ekonomi yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan, seperti akses pendidikan, kesehatan, penghasilan, dan kesempatan berkarir. Salah satu indikator penting yang mencerminkan dampak ketimpangan tersebut adalah partisipasi perempuan dalam angkatan kerja yang tercatat sebesar 57%. Meskipun menunjukkan adanya keterlibatan perempuan dalam dunia kerja, angka ini masih relatif rendah jika dibandingkan dengan partisipasi laki-laki dan dengan potensi penuh tenaga kerja perempuan yang seharusnya bisa dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Selain itu, partisipasi politik perempuan di negara-negara Asia berkembang juga sangat minim, hanya sekitar 15% pada tahun 2023. Rendahnya representasi perempuan dalam ranah politik ini menjadi hambatan dalam penciptaan kebijakan yang adil dan responsif terhadap kebutuhan perempuan. Tanpa keterlibatan perempuan yang cukup dalam pengambilan keputusan

politik, berbagai masalah yang berkaitan dengan kesetaraan gender cenderung kurang diperhatikan dan sulit untuk diatasi secara efektif. Akibatnya, hambatan struktural yang ada sulit dihapuskan dan kesenjangan gender tetap berlanjut, sehingga memengaruhi aspek pembangunan yang lebih luas, termasuk pertumbuhan ekonomi.

Kondisi ketimpangan gender yang demikian berkontribusi secara signifikan terhadap lambatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia berkembang. Dalam konteks global, ketimpangan gender dipandang bukan hanya sebagai persoalan sosial, melainkan juga masalah ekonomi yang serius. Pembatasan terhadap partisipasi perempuan dalam ekonomi menyebabkan pemborosan potensi sumber daya manusia yang dapat mendorong inovasi, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kebijakan dan stakeholder terkait untuk memahami dan mengatasi berbagai dimensi ketimpangan gender demi mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di negara-negara Asia berkembang.

Kebijakan Publik Tentang Ketidaksetaraan Gender Di Negara Berkembang

Ketidaksetaraan gender dalam sektor bisnis dan kesehatan merupakan persoalan multidimensi yang masih membelenggu negara-negara Asia berkembang. Perempuan seringkali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam mengakses modal usaha, berpartisipasi di pasar tenaga kerja formal, dan mendapatkan layanan kesehatan reproduksi yang memadai. Ketimpangan ini bukan hanya mencerminkan ketidakadilan sosial, tetapi juga berdampak langsung terhadap penurunan produktivitas nasional dan pelemahan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Hervías Parejo & Radulović, 2023).

Ketika perempuan tidak diberdayakan secara setara dalam sektor ekonomi, negara kehilangan potensi besar dari setengah populasi yang seharusnya dapat menjadi motor penggerak ekonomi. Berdasarkan laporan McKinsey Global Institute (2020), penyetaraan partisipasi perempuan dalam ekonomi di kawasan Asia-Pasifik diperkirakan dapat menambah hingga USD 4,5 triliun pada Produk Domestik Bruto (PDB) regional pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam kesetaraan gender bukan hanya kebutuhan moral dan sosial, tetapi juga merupakan strategi ekonomi yang rasional dan menguntungkan.

Di sektor kesehatan, perempuan yang tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan maternal cenderung memiliki produktivitas yang lebih rendah, risiko kematian yang lebih tinggi, serta beban ekonomi yang lebih berat dalam rumah tangga. World Bank (2023) mencatat bahwa rendahnya akses terhadap layanan kesehatan perempuan menyebabkan kerugian ekonomi akibat absensi kerja, biaya kesehatan, dan hilangnya potensi tenaga kerja produktif. Oleh karena itu, akses kesehatan yang setara berkontribusi penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan produktif, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam menanggapi tantangan ini, berbagai negara Asia berkembang telah mulai mengadopsi kebijakan publik yang dirancang untuk mengurangi ketimpangan gender. Kebijakan ini mencakup penyediaan akses pembiayaan bagi pengusaha perempuan, program pelatihan keterampilan kerja berbasis gender, hingga layanan kesehatan maternal gratis. Meskipun upaya ini patut diapresiasi, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti resistensi budaya, keterbatasan anggaran, serta lemahnya pemantauan dan evaluasi kebijakan.

Menurut (Pandey et al., 2022) kebijakan publik yang responsif gender memainkan peran kunci dalam menciptakan struktur sosial yang lebih adil dan produktif, serta memperluas partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi formal. Melalui regulasi yang menargetkan akar penyebab ketimpangan gender, negara dapat memperluas basis partisipasi tenaga kerja,

memperbaiki indeks pembangunan manusia (IPM), dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Dengan demikian, mengatasi ketidaksetaraan gender dalam sektor bisnis dan kesehatan bukan hanya menjadi tujuan pembangunan sosial, tetapi juga strategi fundamental untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di negara-negara Asia berkembang.

Tabel 4 Kebijakan Publik Sektor Bisnis di Negara Asia Berkembang

Karakteristik	Pemahaman/Pengertian
India: Stand-Up India Scheme (2016–sekarang)	1. Tujuan: Mendorong kewirausahaan perempuan, terutama dari kelompok marginal. 2. Isi kebijakan: Memberikan kredit usaha antara INR 1 juta–10 juta (sekitar USD 12.000–120.000) kepada perempuan untuk memulai usaha mikro dan kecil. 3. Dampak: Meningkatkan jumlah wirausaha perempuan, meskipun masih terdapat kendala akses informasi dan literasi keuangan di kalangan masyarakat desa.
Indonesia: Kredit Usaha Rakyat (KUR) Inklusif Gender	1. Tujuan: Menyediakan pembiayaan berbunga rendah kepada UMKM termasuk yang dimiliki perempuan. 2. Komponen gender: Meskipun tidak eksklusif untuk perempuan, program ini mendorong keterlibatan perempuan melalui kemitraan dengan koperasi perempuan dan pelatihan kewirausahaan. 3. Perkembangan terbaru: Pemerintah mendorong bank pelaksana untuk membuat kuota tersendiri bagi wirausaha perempuan
Filipina: Gender and Development (GAD)	1. Tujuan: Mengintegrasikan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran lembaga pemerintahperempuan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dalam ekspansi bisnis dan inovasi. 2. Implementasi sektor bisnis: Setiap lembaga wajib mengalokasikan minimal 5% dari anggaran tahunannya untuk program yang berkontribusi pada kesetaraan gender, termasuk pelatihan kewirausahaan bagi perempuan. 3. Efektivitas: Diakui secara internasional sebagai salah satu kerangka anggaran berbasis gender yang paling sistematis di Asia.

Tabel 5 Kebijakan Publik Sektor Kesehatan di Negara Asia Berkembang

Karakteristik	Pemahaman/Pengertian
Bangladesh: Maternal Health Voucher Scheme	1. Tujuan: Meningkatkan akses layanan kesehatan maternal bagi perempuan miskin. 2. Isi kebijakan: Memberikan voucher layanan kesehatan gratis termasuk pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan transportasi ke rumah sakit. 3. Hasil: Telah menurunkan angka kematian ibu dan meningkatkan angka kelahiran di fasilitas kesehatan
Vietnam: National Strategy on Gender Equality (2021–2030)	1. Komponen kesehatan: Fokus pada peningkatan akses layanan kesehatan ibu dan anak serta pencegahan kekerasan berbasis gender. 2. Integrasi sektor bisnis: Mendorong perusahaan menyediakan fasilitas kesehatan dan ruang laktasi bagi pekerja perempuan
Nepal: Safe Motherhood Programme	1. Tujuan: Menjamin akses layanan kesehatan maternal yang aman dan berkualitas. 2. Isi kebijakan: Layanan persalinan gratis, pelatihan bidan desa, serta pemberian insentif bagi ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan. 3. Hasil: Angka kematian ibu menurun drastis sejak 2000-an.

KESIMPULAN

Ketidaksetaraan gender masih menjadi salah satu hambatan struktural paling signifikan dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif di negara-negara Asia yang sedang berkembang. Ketimpangan gender ini tampak nyata, terutama dalam sektor-sektor strategis seperti bisnis dan kesehatan, di mana perempuan kerap menghadapi keterbatasan sistemik dalam mengakses sumber daya, peluang, dan layanan dasar yang esensial bagi peningkatan kualitas hidup dan produktivitas ekonomi mereka. Di sektor bisnis, ketimpangan terlihat dari terbatasnya akses perempuan terhadap modal usaha, pelatihan kewirausahaan, jaringan pasar, serta dukungan kebijakan yang ramah gender. Akibatnya, tingkat kepemilikan usaha oleh perempuan masih rendah, demikian pula partisipasi mereka dalam posisi strategis, seperti manajemen tingkat atas atau dewan direksi, yang penting untuk menentukan arah kebijakan korporasi. Hal ini menunjukkan bahwa potensi perempuan sebagai agen ekonomi belum dimaksimalkan secara optimal.

Sementara itu, di sektor kesehatan, ketidaksetaraan gender tercermin dari masih

kurangnya layanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan, khususnya dalam hal kesehatan reproduksi, maternal, dan perawatan pasca-melahirkan. Akses yang terbatas ini berdampak langsung terhadap tingginya angka kematian ibu, rendahnya kualitas kesehatan perempuan usia produktif, serta meningkatnya beban kesehatan yang harus ditanggung rumah tangga secara keseluruhan. Selain berdampak pada kualitas hidup individu perempuan, situasi ini juga menurunkan produktivitas angkatan kerja perempuan dan memperbesar biaya sosial-ekonomi negara. Ketidakterlibatan perempuan secara penuh dalam berbagai aktivitas ekonomi bukan hanya merupakan bentuk ketidakadilan sosial dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga menyebabkan inefisiensi ekonomi yang pada akhirnya menghambat laju pertumbuhan nasional secara menyeluruh.

Sejumlah kajian dan bukti empiris menunjukkan bahwa kesetaraan gender memiliki korelasi positif yang kuat dengan peningkatan produktivitas nasional, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan peningkatan kapasitas inovatif suatu negara. Ketika perempuan diberikan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam ekonomi—baik melalui kewirausahaan, pekerjaan formal, maupun peran dalam pengambilan keputusan publik—maka basis pertumbuhan ekonomi akan semakin luas dan inklusif. Selain itu, investasi dalam layanan kesehatan perempuan terbukti dapat meningkatkan kualitas SDM secara keseluruhan dan menurunkan beban pengeluaran negara dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan harus dipandang sebagai strategi pembangunan yang tidak dapat ditawar lagi.

Dalam konteks ini, negara-negara Asia berkembang perlu memperkuat kebijakan publik yang berbasis perspektif gender secara sistematis. Hal ini tidak hanya mencakup regulasi yang menjamin kesetaraan hak dan perlindungan dari diskriminasi, tetapi juga integrasi isu gender dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan, mulai dari penganggaran yang responsif gender (gender-responsive budgeting), program perlindungan sosial yang inklusif, hingga reformasi kelembagaan yang mendorong keterwakilan perempuan dalam struktur pengambilan keputusan. Kesetaraan gender bukan hanya merupakan keharusan etis dan moral dalam tatanan masyarakat modern, tetapi juga menjadi syarat utama bagi transformasi ekonomi yang lebih adil, tangguh, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan yang inklusif dan berkeadilan hanya dapat terwujud apabila seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, memiliki ruang, akses, dan kesempatan yang setara untuk berkontribusi secara penuh dalam pembangunan bangsa dan kawasan.

DAFTAR REFERENSI

Adriani, E. (2019). Pengukuran modal manusia (suatu studi literatur). *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, *4*(1), 176–183.

Alfiyahnur, P., & Juliannisa, I. A. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Foreign Direct Investment di Singapura. *Journal Of Development Economic And Digitalization*, *2*(1), 36–55.

Arifin, A. S. (2023). Human capital investment: Meningkatkan daya saing global melalui investasi pendidikan. *Jurnal Education and Development*, *11*(2), 174–179.

Baron, A., & Armstrong, M. (2007). *Human capital management: achieving added value through people*. Kogan Page Publishers.

Budiman, I. F., & Lubis, M. D. F. (2025). Peran moderasi ketidaksetaraan gender pada pengaruh pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang Asia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, *20*(2), 54–72.

Costagliola, A. (2021). Labor participation and gender inequalities in India: Traditional gender

norms in India and the decline in the Labor Force Participation Rate (LFPR). *The Indian Journal of Labour Economics*, *64*(3), 531–542.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.

Halizah, L. R., & Faralita, E. (2023). Budaya patriarki dan kesetaraan gender. *Wasaka Hukum*, *11*(1), 19–32.

Hervías Parejo, V., & Radulović, B. (2023). Public policies on gender equality. In *Gender-competent legal education* (pp. 405–428). Springer International Publishing Cham.

Irfan, B., & Anirwan, A. (2023). Pelayanan Publik Era Digital: Studi Literatur. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, *4*(1), 23–31.

Kalindi, A. M., Houle, B., Smyth, B. M., & Chisumpa, V. H. (2023). Gender inequities in women's access to maternal health care utilisation in Zambia: a qualitative analysis. *BMC Pregnancy and Childbirth*, *23*(1), 755.

Kaloko, N., Sihombing, N., Lubis, S. A., & Tanjung, T. P. R. (2025). Peran Strategis Pendidikan dan Kesehatan dalam Pembangunan Ekonomi: Membangun Human Capital untuk Masa Depan. *Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*, *3*(1), 291–298.

Kedhaton, K., & Adzmy, M. F. (2024). Paradiplomasi dalam Isu Kesetaraan Gender: Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Jember dan Rutgers WPF Melalui Program Power to Youth (PtY) 2021-2023 [Paradiplomacy in Gender Equality Issues: Collaboration between Jember Regency Government and Rutgers WPF]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, *15*(1), 81–102. https://doi.org/10.22212/jp.v15i1.4358

Kennedy, E., Binder, G., Humphries-Waa, K., Tidhar, T., Cini, K., Comrie-Thomson, L., Vaughan, C., Francis, K., Scott, N., & Wulan, N. (2020). Gender inequalities in health and wellbeing across the first two decades of life: an analysis of 40 low-income and middle-income countries in the Asia-Pacific region. *The Lancet Global Health*, *8*(12), e1473–e1488.

Kertati, I. (2021). Analisis indeks pembangunan gender (ipg) dan indeks pemberdayaan gender (idg) kota surakarta. *Public Service and Governance Journal*, *2*(01), 1–11.

Lim, H. C., & Silalahi, A. M. (2024). Analisis Kebijakan Publik Terhadap Kesetaraan Gender: Studi Kasus Di Negara-Negara Berkembang. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, *4*(2), 25–31.

Mincer, J. (1994). *Investment in US education and training*. National Bureau of Economic Research Cambridge, Mass., USA.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revi). Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Napitupulu, F., & Ekawaty, M. (2022). Ketimpangan gender dan pertumbuhan ekonomi: Studi kasus pada negara-negara Asia Timur Dan Pasifik. *Journal of Development Economic And…. Https://Jdess. Ub. Ac. Id/Index. Php/Jdess/Article/View/8*.

Pandey, S. K., Newcomer, K., DeHart-Davis, L., McGinnis Johnson, J., & Riccucci, N. M. (2022). Reckoning with race and gender in public administration and public policy: A substantive social equity turn. *Public Administration Review*, *82*(3), 386–395.

Rani, R. P. H. (2020). Analisis Paradigma Pembangunan di Indonesia. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, *1*(1), 40–52.

Ravika, A., Aulia, A. S., & Komala, J. F. (2024). Pengaruh Kesetaraan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi Studi Kasus Implementasi SDGs Kelima di Indonesia. *PARAHYANGAN ECONOMIC DEVELOPMENT REVIEW*, *3*(2), 164–183.

Sari, C. O., Widya, N., Septika, E., Fitria, F., & Fikria, A. (2025). Pengaruh Tingkat Pendidikan

terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Perempuan Usia Produktif di Kota Tangerang. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *4*(1), 24–38.

Shintiya, P., Abdullah, M. N. A., & Mujayapura, M. R. R. (2025). WARISAN PATRIARKI: HAMBATAN STRUKTURAL BAGI PEREMPUAN DI DUNIA KERJA. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara*, *4*(2), 171–179.

Sredojević, D., Cvetanović, S., & Bošković, G. (2016). Technological changes in economic growth theory: neoclassical, endogenous, and evolutionary-institutional approach. *Economic Themes*, *54*(2), 177–194.

van Daalen, K. R., Jung, L., Dada, S., Othman, R., Barrios-Ruiz, A., Malolos, G. Z., Wu, K.-T., Garza-Salas, A., El-Gamal, S., & Ezzine, T. (2024). Bridging the gender, climate, and health gap: the road to COP29. *The Lancet Planetary Health*, *8*(12), e1088–e1105.

Wibowo, F., & Utomo, C. W. (2023). Peran Human Capital di Perusahaan. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen Dan Bisnis*, *1*(1), 15–21.

Yuniarsih, N., Rohmalia, Y., Saleh, A. R., Nijomi, S. R., Septianti, A., & Farida, A. N. (2022). Penerapan Human Capital Manajemen dalam Meningkatkan Kualitas SDM Terhadap Kinerja Perusahaan. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, *2*(2).